

**ANALISA DAMPAK FAKTOR MAKRO EKONOMI :
INFLASI DAN KURS PADA DUA ERA PEMERINTAHAN
TERHADAP NILAI PROFITABILITAS PERUSAHAAN PERBANKAN SYARIAH
(Studi pada Bank Umum Syariah Periode 2009 - 2018)**

Oleh:
Sri Anugrah Natalina¹ dan Zuraidah²
Email: anugrah.sujadmiko@yahoo.com

Abstract

Banking is a type of service business that is very vulnerable to be influenced by many factors, both internal and external. The dominating external factors are those related to government regulations, for example: the SBI interest rate, exchange rate, fiscal policy and the inflation rate. The level of profitability of a Sharia Commercial Bank (BUS) contained in the annual report of a BUS may not be used as a factor to be able to reveal the size of the profitability (ROA) which can be influenced by external factors. This shows that during the SBY administration era, inflation had no effect on the level of profitability of BUS. This may be due to the inflation rate that occurs with a more stable value, namely the conversion rate at 3-5. However, if the inflation rate fluctuates, it can have an influence on profitability in BUS. In the era of Jokowi's administration, it was shown that in the early years of his administration, namely 2014-2015, it showed a high inflation rate so that this may have resulted in an influence on the profitability of BUS. the two variables, namely inflation and exchange rate have an influence on the profitability of BUS. And in the Jokowi era, the influence has increased by 10% compared to the SBY era. In the SBY era, it only contributed 20.5%, while in the Jokowi era it was 30.5%. Other variables outside this study that can affect BUS profitability / ROA can be derived from SBI and GDP.

Keywords: *inflation, exchange rates and Sharia Bank Profitability Performance*

A. Pendahuluan

Negara khususnya bank sentral harus dapat menjaga bagaimana dunia perbankan dapat tetap hidup dan berkembang, dengan adanya pengalaman krisis moneter tahun 1996-1997 maka keadaan tersebut benar-benar menjadi sebuah pembelajaran. Banyak regulasi yang diperbarui salah satunya adalah batas kecukupan modal bank, tingkat suku bunga SBI, dan adanya lembaga penjaminan simpanan. Tujuan utama sebuah perusahaan baik perusahaan manufacture maupun perusahaan jasa yang dalam hal ini perusahaan perbankan adalah dalam jangka panjang dengan mengoptimalkan nilai atau kinerja dalam perusahaan, hasil ini mendukung penelitian yang dihasilkan oleh Wahyudi dan Pawestri. (Wahyudi, dan Pawestri. H.P. 2006)

¹ Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kediri

² Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Kediri

Sedangkan banyak penelitian yang memberikan hasil bahwa nilai atau kinerja dalam perusahaan akan tercermin dari harga saham perusahaan. (Fama, Eugene F, 1978) Untuk perusahaan sector jasa dalam hal ini lembaga perbankan maka kinerja perbankan dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan maupun non keuangan (PBI No. 13/1/PBI/2011). (Muljono, Teguh Pudjo, 2000;86) Ekonomi makro merupakan salah satu factor yang sangat berperan dalam perkembangan suatu perusahaan baik perusahaan manufacture maupun lembaga perbankan. Dan ekonomi makro pada setiap negara akan menunjukkan kondisi yang berbeda-beda dan sangat tergantung pada pola kebijakan yang ditetapkan oleh kepala pemerintahannya. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menunjukkan pola kebijakan ekonomi yang cukup berbeda pada era Susilo Bambang Yodhoyono dan era Joko Widodo, bentuk keberbedaan yang cukup menarik adalah cara melakukan penekanan tingkat inflasinya dan bagaimana mengelola tingkat nilai tukar mata uangnya.

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk menilai suatu negara dalam keadaan stabilitas ekonomi yang baik atau tidak baik. Pada tahun 2016 menunjukkan nilai inflasi sebesar 4%, hal ini menunjukkan angka nilai inflasinya sama pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 3.5%, pengukuran inflasi tersebut dengan nilai deviasi sebesar $\pm 1\%$. Besaran nilai inflasi tercantum dalam regulasi pemerintah lewat Peraturan Menteri Keuangan Nomor.93/PMK.011/2014 yang diterbitkan pada tanggal 21 Mei 2014. Untuk periode tahun 2019 – 2021 di tetapkan nilai inflasinya adalah sebesar masing-masing Tahun 2019 sebesar 3.5%, tahun 2020 sebesar 3.0% dan tahun 2021 sebesar 3.0% dengan deviasi masing-masing pertahunnya $\pm 1\%$. Periode 2009-2019, rata-rata inflasi tahunan umum Indonesia selama satu dekade adalah 5,94% per tahunnya. Badan Pusat Statistika Indonesia mempunyai tugas salah satunya adalah dengan melakukan survey di lapangan untuk mengetahui kenaikan atas harga secara rata-rata dari keseluruhan barang yang ada di pasar. Untuk periode persurveynya adalah dalam satu tahunan. Kegiatan tersebut di namakan sebagai inflasi tahunan umum. Hasil dari survey ini harus dipahami bahwa mungkin ada biaya yang naiknya atau turunnya kurang dari rata-rata yang dihasilkan; di sisi lain, ada biaya yang kenaikannya atau penurunannya lebih besar dari angka yang di hasilkan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa tugas kepala pemerintahan / presiden sangat sulit bila dihadapkan dalam pengaturan tingkat inflasi. Hal ini disebabkan pada kenaikan harga pada umumnya bisa terjadi kapan saja dan terjadi setiap saat, di mana saja, selanjutnya tak peduli pada negara dan rezim yang sedang dipimpin siapa. Pada masa pemerintahan tahun 2010 – 2014 yaitu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan atau pada masa pemerintahan tahun 2014

– 2019 dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kenaikan ataupun penurunan harga juga terjadi. Yang berbeda antara kedua era pemerintahan tersebut adalah persentase kenaikannya/penurunannya dan kecepatan naiknya/ turunnya. Kestabilan ekonomi dari suatu negara dapat juga dilihat dari pergerakan nilai tukar mata uangnya (rupiah). Nilai tukar mata uang Indonesia (rupiah) terhadap mata uang Amerika Serikat (dollar) dalam setiap hitungan waktu terus mengalami perubahan. Di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat diketahui bahwa nilai tukar mata uang (rupiah) terhadap mata uang dolar AS juga pernah dan sering terjadi kenaikan dan penurunan seperti kejadian keterpurukan mata uang rupiah hingga mencapai Rp 14.710,-. Posisi nilai tukar mata uang rupiah tersebut dicatatkan pada tanggal 24 September 2015, seperti mengutip data *RTI*, mata uang dolar AS dibuka / dimulai dengan nilai Rp 14.610,- , dan nilai tertinggi di Rp. 14.855,- dan nilai terendah di Rp.14.710,-. Sementara di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), negara Indonesia pernah menjadi masa krisis ekonomi / finansial global. Pada tahun 2007 kondisi perekonomian global terjadi, akibat krisis *subprime mortgage* di AS, nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS berada pada kisaran nilai Rp 9.000,- - Rp. 10.000,-. Pelemahan mata uang rupiah di Indonesia justru terjadi setelah krisis finansial akan berakhir dan mata uang negara-negara barat mulai pulih kembali. Sekitar tahun 2009 atau berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menunjukkan dolar AS sudah berada di rentang Rp 11.800 hingga di atas Rp 12.000,-

Keberadaan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan terus menerus. Nampak data pada tahun 2009 - 2012 aset pada perbankan syariah secara mayoritas di Indonesia yang terus tumbuh setiap tahunnya. Pada akhir tahun 2009, total aset perbankan syariah sebesar Rp 66 triliun dan pada akhir tahun 2012 menjadi Rp 195 triliun. Sedangkan nilai dana pihak ketiga (DPK) sampai bulan Desember 2012 telah mencapai Rp 147,5 triliun. Ditinjau dari sisi pembiayaan juga mengalami peningkatan yaitu Rp 46,9 triliun pada akhir tahun 2009, menjadi Rp 147,5 triliun pada akhir tahun 2012.

B. Pembahasan

1. Profitabilitas

Menurut I Made (2011 : 22) profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan perusahaan. Profitabilitas perusahaan menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Semakin tinggi tingkat profitabilitas

perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosialnya. Heinze dan Gray dalam penelitian Rheza dan Paulus juga menjelaskan bahwa profitabilitas suatu perusahaan merupakan faktor yang membuat manajemen menjadi bebas dan fleksibel untuk mengungkapkan pertanggungjawaban sosial kepada pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka semakin besar pengungkapan informasi sosial. (Rheza dan Basuki, 2015 :3)

Umumnya setiap perusahaan bertujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Para manajemen perusahaan dituntut harus mampu mencapai target yang telah direncanakan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang paling populer di kalangan investor. Rasio ini memberikan pemahaman kepada penggunaannya terkait seberapa baik sebuah perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kesejahteraan pemegang sahamnya.

Menurut Agus Sartono definisi rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. Dengan demikian bagi investor jangka panjang akan sangat berkepentingan dengan analisis profitabilitas ini. Sedangkan menurut Kasmir definisi rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Intinya bahwa penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Sedangkan dalam bukunya Fahmi dijelaskan bahwa rasio profitabilitas yaitu untuk menunjukkan keberhasilan perusahaan di dalam menganalisis dengan cermat kelancaran sebuah perusahaan dan kemampuannya untuk mendapatkan keuntungan. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dan keberhasilan perusahaan dalam memperoleh laba yang hubungannya dengan penjualan, aktiva maupun investasi. Semakin tinggi rasio profitabilitasnya, semakin baik sebuah perusahaan menjalankan operasionalnya, maka semakin baik nama perusahaan dimata investor. Meskipun begitu, paradigma yang ada dalam penilaian rasio ini tidak hanya sebatas seberapa besar sebuah perusahaan dapat menghasilkan profit namun juga seberapa konsisten ia mampu mempertahankan kinerjanya tersebut di masa yang akan datang.

Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak internal, tetapi juga bagi pihak eksternal atau diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas adalah:

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Manfaat yang diperoleh rasio profitabilitas yaitu:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2. Makro Ekonomi

Indikator makro ekonomi yang sering dihubungkan dengan pasar modal antara lain :

- a) **Inflasi**, merupakan nilai dari harga-harga barang khususnya barang kebutuhan pokok yang beredar di masyarakat yang nilainya mengalami kenaikan. (Nanga, Muana, 2001;241) Definisi tersebut berakibat bahwa kenaikan tingkat harga umum (*general price level*) yang mungkin hanya terjadi secara isidentil atau terjadi sekali waktu saja tidak dapat disebut sebagai inflasi.
- b) **Kurs atau nilai tukar mata uang** dapat diartikan sebagai nilai atau harga dari sebuah mata uang luar negeri bila diukur dari nilai mata uang dalam negeri. (Dornbusch, R., Fischer, S., and Starz, R, 2008;46) Banyak penelitian yang berusaha untuk menghubungkan antara kurs dengan harga saham, dan menghasilkan sebuah temuan bahwa perbedaan arah dalam hubungan antara keduanya dapat dijelaskan berdasarkan teori dengan pendekatan konvensional tradisional dan model keseimbangan portofolio. Banyak pertentangan dari penelitian terdahulu atas hubungan kurs dengan harga saham, dengan hasil negative atau lemah hubungannya antara keduanya disampaikan oleh Gupta,*et.al.* (Gupta, Jyoti P., Alain Chevalier and

Fran Sayekt, 2000) Sedangkan yang menghasilkan nilai hubungan yang positif adalah penelitian yang dilakukan oleh Wangbangpo dan Sharma dan penelitian ini dilakukan di Indonesia, Malaysia, dan Filipina, dan berlaku sebaliknya berhubungan negatif di Singapura dan Thailand. (Wongbangpo, Praphan dan Subhash C. Sharma, 2002; 27-51) Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian dari Wangbangpo dan Sharma adalah penelitian yang dihasilkan oleh Kandır, bahwa tingkat return dari semua portofolio mengalami peningkatan semuanya atas nilai kurs yang ada. (Kandır, Serkan Yilmaz, 2008;16) Tidak adanya hubungan antara tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang dengan tingkat harga saham merupakan penelitian yang diuraikan oleh Mok, penelitian ini difokuskan pada obyek pasar saham terbuka dan tertutup di Hongkong. (Mok, Henry MK, 1993;123-129)

- c) **Suku Bunga**, merupakan nilai yang diharapkan dikemudian hari atas investasi atau pembiayaan/pinjaman yang dirupakan dalam bentuk prosentase setiap tahunnya yang ditetapkan nilainya dan diatur oleh pemerintah. (Dornbusch, R., Fischer, S., and Starz, R, 2008, 43) Perlu adanya tarik menarik antara demand dan supply untuk menentukan suku bunga, sama seperti harga. Bank Indonesia juga menentukan tingkat suku bunga atas produk Sertifikat Bank Indonesia (SBI). SBI merupakan salah satu mekanisme yang digunakan Bank Indonesia untuk mengontrol kestabilan nilai Rupiah.

Harga saham dapat dinilai dan diukur dengan melihat tinggi dan rendah tingkat suku bunga, dan bersentimen negative untuk harga sahamnya bila tingkat suku bunganya juga tinggi. Hal ini mengakibatkan para investor akan beralih bentuk investasinya ke bentuk tabungan atau deposito karena tanpa resiko.

- d) **Produk Domestik Bruto**, dalam suatu negara dalam mengukur tingkat kemampuannya atas produk barang dan jasanya yang dihasilkan dalam satu periode atau satu tahun yang didasari dari harga pasarnya, adalah definisi tentang PDB menurut Samuelson dan Nordhaus. Jadi PDB adalah ukuran dari nilai barang dan jasa yang dihitung dalam pendapatan negara secara nasional dari barang dan jasa yang diproduksi dengan faktor-faktor produksinya.

3. Hasil dan Pembahasan

a. Pengaruh Faktor Makro Ekonomi Inflasi dan Kurs Terhadap Nilai Profitabilitas Perusahaan Perbankan Syariah di Era Dua Pemerintahan

Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono, menunjukkan nilai signifikansi bahwa $0,112 > 0,05$, sehingga H_{01} diterima yang artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara Inflasi (X1) terhadap profitabilitas (ROA) atau variabel (Y). Nilai *signifikansi* dalam tabel *coefficients* adalah sebesar 0,001. Hasil menunjukkan bahwa $0,001 < 0,05$, sehingga H_{02} ditolak yang artinya *Kurs* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) / (Y).

Sedangkan pada era pemerintahan Joko Widodo menunjukkan bahwa $0,003 < 0,05$, sehingga H_{01} ditolak yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara Inflasi (X1) terhadap profitabilitas (ROA) atau variabel (Y). Nilai *signifikansi* dalam tabel *coefficients* adalah sebesar 0,014. Hasil menunjukkan bahwa $0,014 < 0,05$, sehingga H_{02} ditolak yang artinya *Kurs* (X2) berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) / (Y).

Tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS) yang terdapat dalam laporan tahunan BUS kemungkinan belum dijadikan sebagai salah satu faktor untuk dapat mengungkapkan besar kecilnya Profitabilitas (ROA) dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Hal ini ditunjukkan bahwa pada era pemerintahan SBY menunjukkan inflasi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat profitabilitas BUS. Hal ini mungkin disebabkan karena nilai inflasi yang terjadi dengan nilai yang lebih stabil yaitu averagenya di angka 3-5. Akan tetapi bila nilai inflasi terjadi fluktuasi maka dapat memiliki pengaruh pada profitabilitas di BUS. Di era pemerintahan Jokowi menunjukkan pada tahun awal pemerintahannya yaitu di tahun 2014-2015 menunjukkan nilai inflasi yang tinggi sehingga mungkin ini yang mengakibatkan adanya pengaruh terhadap profitabilitas BUS.

Untuk Kurs baik di pemerintahan SBY maupun Jokowi menunjukkan adanya pengaruh atas tingkat profitabilitas BUS. Bila dilihat dari komposisi data di dua era pemerintahan menunjukkan bahwa range nilai kurs pada era SBY berada di sekitaran Rp. 8.000,- - Rp. 12.000,- sedangkan di era Jokowi ada di range Rp. 11.000,- - Rp. 15.000,-, dengan nilai tersebut bila dibandingkan dengan nilai ROA menunjukkan profitabilitas di BUS di dua era tersebut menunjukkan fluktuasi yang hampir sama.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian Nazwar (2008) bahwa untuk factor makro ekonomi : Inflasi dan kurs setelah diuji menunjukkan hasil tidak berpengaruh.. Sebaliknya, pada saat tingkat profitabilitas rendah, perusahaan berharap bahwa factor eksternal dapat memberikan stimulus yang baik agar kinerja BUS dapat meningkat kembali bila kondisi perekonomian yang stabil. Pada era pemerintahan SBY menunjukkan, nilai F_{hitung} sebesar 7.357 dengan signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya yaitu membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menggunakan $\alpha = 0,05$, $dfl = 2$ dan $df2 = 57$. Diperoleh F_{tabel} sebesar 3,13, sedangkan F_{hitung} sebesar 7, 357. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($7, 357 > 3,16$). Dengan demikian variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Sedangkan pada era pemerintahan Jokowi menunjukkan, nilai F_{hitung} sebesar 12.488 dengan signifikansi sebesar 0,001 yang berarti lebih kecil dari 0,05 atau 5%. Selanjutnya yaitu membandingkan antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , dimana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka secara simultan variabel-variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Menggunakan $\alpha = 0,05$, $dfl = 2$ dan $df2 = 57$. Diperoleh F_{tabel} sebesar 3,13, sedangkan F_{hitung} sebesar 12.488. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($12.488 > 3,16$). Dengan demikian variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa di era SBY dan Jokowi menunjukkan bahwa inflasi dan kurs sama-sama secara simultan memiliki pengaruh ke profitabilitas BUS. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa di kedua era pemerintahan tersebut kondisi perekonomian bangsa Indonesia pada prinsipnya dalam kondisi yang sama. Karena factor eksternal sangat tergantung juga pada kondisi stabilitas global / internasional. Bila dilihat dari nilai inflasi yang di era SBY range nya lebih kecil dan stabil karena pada era SBY kondisi ekonomi global dan nasional tidak bergejolak, sedangkan pada saat di era awal pemerintahan Jokowi sedang ada gejolak di ekonomi global dan nasional. Nampak pengaruh yang terlihat di era Jokowi nilai kurs cenderung naik terus darui awal pemerintahan di level Rp. 11.000,- sampai di akhir pemerintahannya menunjukkan angka menembus angka Rp. 15.000,-. Untuk inflasi era Jokowi tidak mampu menata tingkat inflasi di 2 tahun awal pemerintahannya akan tetapi mulai di tahun ke 3 sampai ke 4 menunjukkan kecenderungan stabil di angka 4.

Berdasarkan tabel output SPSS “*Model Summary*” era SBY diatas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar 0,205. Besarnya angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,205 atau sama dengan 20,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Inflasi (X1) dan variabel *Kurs* (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Profitabilitas / ROA (Y) sebesar 20,5%. Sedangkan sisanya ($100\% - 20,5\% = 79,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini.

Berdasarkan tabel *output* SPSS “*Model Summary*” era Jokowi diatas, diketahui nilai koefisien determinasi atau *R Square* adalah sebesar 0,305. Besarnya angka koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,305 atau sama dengan 30,5%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel *Kurs* (X1) dan variabel *Kurs* (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variabel Profitabilitas / ROA (Y) sebesar 30,5%. Sedangkan sisanya ($100\% - 30,5\% = 69,5\%$) dipengaruhi oleh variabel lain diluar persamaan regresi ini.

Dapat disimpulkan bahwa kedua variable yaitu inflasi dan kurs mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas BUS. Dan di era Jokowi menunjukkan pengaruhnya semakin meningkat 10% di bandingkan di era SBY. Pada era SBY hanya menyumbang pengaruh sebesar 20,5% sedangkan pada era Jokowi sebesar 30,5%. Variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi Profitabilitas / ROA BUS dapat berasal dari SBI dan PDB.

BUS selaku perusahaan perbankan yang di miliki oleh negara Indonesia dan juga bisa dijadikan tolak ukur stabilitas ekonomi suatu negara. Bila BUS bias berjalan dengan baik, atau profitabilitasnya meningkat maka dapat dijadikan ukuran bahwa kondisi ekonomi negara juga dalam keadaan yang baik pula. Oleh karena itu, BUS bila berusaha memperoleh keuntungan dalam proses kinerjanya sesuai dengan QS. Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ لَأْخِرَةٍ تَرَدُّ لَهُ، فِي حَرْثِهِ، وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّ

نْيَا نُؤْتِهِ، مِنْهَا وَمَا لَهُ، فِي آخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ {٢٠}

Artinya: “Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barangsiapa menghendaki keuntungan di dunia kami berikan kepadanya sebagian darinya (keuntungan dunia), tetapi dia tidak akan mendapat bagian di akhirat. (Q.S Asy-Syura:20)

Dalam hal ini maka, mengambil keuntungan tidak hanya untuk memperoleh bagian dunia saja maka dalam pengambilan keuntungan dalam transaksi perbankan syariah diharuskan didapatkan hanya jika dasar perdapatan berdasarkan kesepakatan bersama (suka sama suka) bukan dengan jalan yang tidak diridhai Allah SWT. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono (SBY) bahwa dalam menyusun regulasi tentang subsidi energi bahwa sedikit saja pemerintah lambat untuk membuat kebijakan maka akan dapat menyebabkan inflasi yang tinggi dan akan menjadi bahan politisasi. Pada akhir tahun 2005, di masa jabatan yang masih satu tahun, pemerintahan SBY membuat kebijakan untuk memangkas subsidi BBM dengan menaikkan harga BBM subsidi sebesar dua kali lipat. Keputusan yang di ambil dalam pemerintahan saat itu karena harga minyak internasional sedang meningkat secara pesat antara tahun 2002 sampai tahun 2006. Namun, secara lapangan terjadi perselisihan yang cukup signifikan antara harga pasar dengan harga BBM bersubsidi di Indonesia,

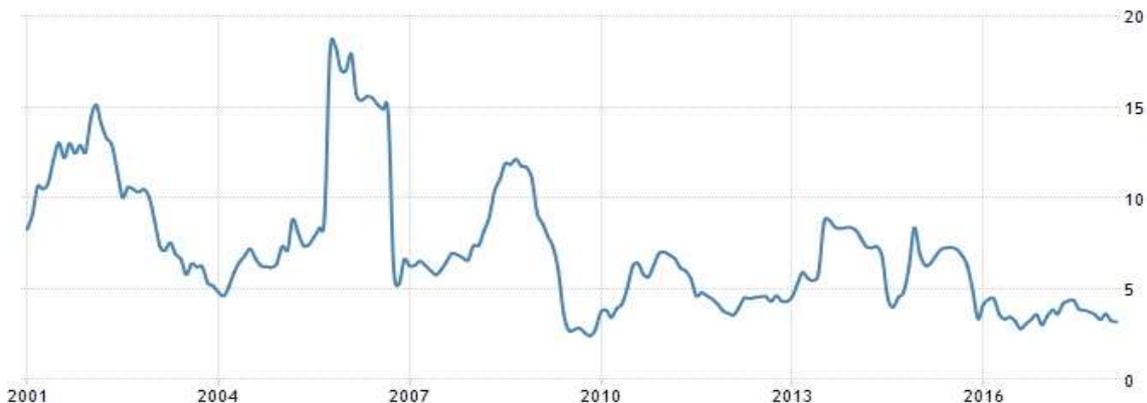
Hal ini menyebabkan inflasi menyentuh kenaikan dua digit, yaitu antara 14 dan 19 persen (tahun ke tahun) hingga Oktober 2006. Keputusan SBY dengan menaikkan harga BBM bersubsidi pada tahun 2008 mengakibatkan gejolak dengan adanya demonstrasi-demonstrasi. Namun, di saat 2009, terjadi harga minyak internasional menurun pada saat krisis keuangan global, SBY melakukan kebijakan dengan memangkas harga bahan bakar bersubsidi BBM. SBY juga melakukan kebijakan mengubah arah saat harga minyak internasional turun drastis selama krisis keuangan global. Selain karena disebabkan harga minyak internasional yang sedang turun secara cukup signifikan, diasumsikan bahwa pemerintahan SBY juga senang menurunkan harga BBM bersubsidi menjelang adanya pemilihan 2009 karena pasti akan meningkatkan kemungkinan untuk terpilih kembali sebagai kepala negara.

Dengan kompleknya permasalahan dalam membuat kebijakan pada pemerintahan, maka dibutuhkan seorang presiden yang berpikiran reformasi untuk melakukan itu. Pada tahun 2014 Joko Widodo dengan memenangkan pemilihan presiden 2014 dan diresmikan sebagai presiden ketujuh Indonesia pada Oktober 2014. Kebijakan fenomenal yang dilakukan kebijakan presiden Joko Widodo yaitu menaikkan harga BBM bersubsidi. Kebijakan tersebut mengakibatkan efek samping negatifnya adalah laju inflasi negara, yang baru saja mulai pulih menuju target Bank Indonesia sebesar 4,5 persen (setelah kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2013), tidak punya waktu untuk pulih lebih lanjut, dan malah berakselerasi

lagi menjadi 8,4 persen (y/y) pada akhir 2014. Ini sebuah keputusan yang susah tetapi diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi struktural jangka panjang.

Pada awal tahun 2015, Presiden Jokowi sangat beruntung karena harga minyak global telah turun drastis sejak pertengahan 2014 di tengah permintaan global yang lemah, sementara pasokan minyak kuat karena angka produksi minyak yang tinggi di negara-negara OPEC serta revolusi gas shale AS. Oleh karena itu, Jokowi memutuskan untuk menerapkan kebijakan yang berani. Dia menghapus sebagian besar subsidi premium sementara menetapkan subsidi sebesar Rp 1.000 per liter untuk solar. Juga diterapkan kebijakan baru terkait harga BBM bersubsidi yaitu pemerintah akan menentukan harga premium dan solar setiap kuartal dan harga-harga ini akan berfluktuasi sejalan dengan harga minyak internasional. Namun, karena minyak bumi global pulih secara hati-hati pada paruh pertama tahun 2015, inflasi Indonesia tetap tinggi pada pertengahan 2015 dan baru mulai mereda pada akhir 2015.

Gambar 1.1
Tingkat Inflasi Indonesia



Sources: www.tradingeconomics.com and Statistics Indonesia (BPS)

Kebijakan pemerintah sekarang melalui Bank Indonesia tentang Makro Ekonomi, tercermin pada elemen-elemen pokok ITF termasuk pengumuman sasaran inflasi kepada publik, kebijakan moneter yang ditempuh secara *forward looking*, dan akuntabilitas kebijakan kepada publik tetap menjadi bagian *inherent* dalam *Flexible ITF*. Berikut adalah elemen ITF :

- a. Inflasi tetap merupakan target utama kebijakan moneter.
- b. Pengintegrasian kebijakan moneter dengan kebijakan makroprudensial untuk memperkuat transmisi kebijakan dan mendukung stabilitas makroekonomi.

- c. Penguatan kebijakan nilai tukar dan arus modal dalam mendukung stabilitas makroekonomi.
- d. Penguatan koordinasi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah baik untuk pengendalian inflasi maupun stabilitas sistem keuangan.
- e. Penguatan komunikasi kebijakan sebagai bagian dari instrumen kebijakan.

Kebijakan pemerintah atas nilai tukar dilakukan dalam rangka mengurangi gejolak yang akan muncul dari ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran di pasar valuta asing (valas), melalui pola intervensi valas dan dual intervention. Berbagai kebijakan yang dijalankan diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama Pemerintah, khususnya terkait dari sisi penawaran. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dengan Pemerintah yang semakin kuat diwujudkan melalui forum Tim Pengendali Inflasi (TPI) baik di pusat maupun daerah.

Gambar 1.2
Perkembangan Lembaga Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2009 – 2018

Indikator	Periode									
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
BUS	717	1.226	1.052	1.756	2.009	2.163	1.990	1.869	1.825	1.868
UUS	312	285	360	541	613	320	311	332	344	347
BPRS	363	436	519	559	565	276	283	287	274	289
ASSET (miliar Rp.)	66.090	97.519	145.467	195.018	242.276	272.343	296.262	356.504	424.181	451.202
DPK (miliar Rp.)	52.271	76.036	115.415	147.512	183.534	217.859	231.175	279.333	334.888	354.421

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan Syariah (2009 – 2018)

Pertumbuhan dan perkembangan pada lembaga perbankan syariah setiap periode menunjukkan angka yaitu : mengalami tingkat perkembangan yang fluktuatif. Apabila melihat pada jendela internasional, dalam *Islamic Finance Country Index* (GIFR, 2017) tercatat bahwa Indonesia menempati ranking ke-7 setelah Malaysia, Iran, Saudi Arabia, United Arab Emirates, dan Kuwait. Negara Indonesia menempati ranking ke-6 pada tahun 2016, bila di dibandingkan dengan sebelumnya berarti minus satu ranking. Industri keuangan syariah memang terbilang berjalan ditempat jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut. Data tersebut diatas dapat membuktikan bahwa Indonesia memiliki potensi dan peluang yang cukup besar untuk perkembangan industri perbankan syariah kedepannya, mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data tersebut diatas antara inflasi yang berfluktuatif dan kurs rupiah yang juga berfluktuasi ternyata kinerja Perbankan Syariah tetap tumbuh. Hal ini menunjukkan bahwa antara kebijakan dua

pemerintahan yaitu SBY maupun Joko Widodo tetap menunjukkan perkembangan Perbankan Syariah ke arah positif atau meningkat kinerjanya.

C. Penutup

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan penelitian ini, memiliki kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa: *pertama*, Berdasarkan uji F menunjukkan bahwa di era SBY dan Jokowi menunjukkan bahwa inflasi dan kurs sama-sama secara simultan memiliki pengaruh ke profitabilitas BUS. Sehingga dari hasil ini menunjukkan bahwa di kedua era pemerintahan tersebut kondisi perekonomian bangsa Indonesia pada prinsipnya dalam kondisi yang sama. kedua variable yaitu inflasi dan kurs mempunyai pengaruh terhadap profitabilitas BUS. Dan di era Jokowi menunjukkan pengaruhnya semakin meningkat 10% di bandingkan di era SBY. *Kedua*, Pada era SBY hanya menyumbang pengaruh sebesar 20,5% sedangkan pada era Jokowi sebesar 30,5%. Variabel lain di luar penelitian ini yang dapat mempengaruhi Profitabilitas / ROA BUS dapat berasal dari SBI dan PDB

Daftar Pustaka

- Atmaja, L.S, (2008), *Teori dan Praktek Manajemen Keuangan*. Andi Offset, Yogyakarta.
- Brigham, E.F. dan Houston J.F, (2006), *Fundamental of Financial Management*. Ninth Edition, United States of America: Horcourt College.
- Dornbusch, R., Fischer, S., and Starz, R,(2008), *Macroeconomics*. Ninth Edition, Boston: McGraw Hill.
- Fama, Eugene F ,(1978), *The Effect of a Firm's Investment and Financing Decision on the Welfare of Its Security Holders*. *American Economic Review*, Vol 68 : 272 - 280.
- Granger C. W., Huang B. dan Yang C, (1998), A Bivariate Causality Between Stock Prices And Exchange Rates: Evidence from Recent Asian Flu. *The Quarterly Review Of Economics And Finance*. Volume 40 : 337-354.
- Gupta, Jyoti P., Alain Chevalier and Fran Sayekt, 2000. The Causality Between Interest Rate, Exchange Rate and Stock Price in Emerging Market: The Case Of The Jakarta Stock Exchange. *Working Paper Series*. EFMA 2000.Athens.
- Helfert, Eric A, 1997. *Techniques of Financial Analysis: A Practical Guide to Managing and Measuring Business Performance*. Ninth Edition, USA: Mc Graw Hill.
- Husnan, S dan Pudjiastuti.E, 1998. *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN, hal. 87
- I Made, *Manajemen Keuangan Perusahaan Teori dan Praktek* (Jakarta: Erlangga, 2011), 22.
- Jensen, M.C, dan Meckling W.H, 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost and Capital Structure. *Journal of Finance Economics*, V.3, No. 4:305-360.
- Kandir, Serkan Yilmaz, 2008. Macroeconomic Variables, Firm Characteristics and Stock Returns: Evidence from Turkey. *International Research Journal of Finance and Economics* ISSN 1450-2887 Issue 16.
- Kewal (2012) Kewal, Suramaya Suci, 2012. *Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, Dan Pertumbuhan PDB Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan*. *Jurnal Economia*, Volume 8, Nomor 1, April:53-64.

- Kusmayadi, Dedi, 2012. Determinasi Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Serta Implikasinya Pada Kinerja Bank Pemerintah Daerah Kab. Tasikmalaya, 30 BPR. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.16, No. 1, Januari:147-156.
- Nanga, Muana, 2001. *Makroekonomi*. Edisi 1, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Mok, Henry MK, 1993. Causality of Interest Rate, Exchange rate, and Stock price at Stock Market Open and close in Hongkong. *Asia Pacific Journal of Management*. Vol.10:123-129.
- Muljono, Teguh Pudjo, 2000. *Analisa Laporan Keuangan Untuk Perbankan*. Jakarta: Djambatan.
- Rahyuda, Henny, 2010. *Pengaruh Faktor Fundamental Perusahaan Dan Makro Ekonomi Terhadap Return Saham LQ 45 Di BEI 1998-2008*. Disertasi, Ilmu Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Rheza Dwi dan Paulus Basuki, "Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Tipe Industri, dan Pengungkapan Media Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility", *Diponegoro Journal of Accounting*, 4 (2015),
- Setiabudi, Andy dan Dian Agustia, 2012. *Fundamental Factor of Firm Due To The Firm Value*. *Journal Of Basic And Applied Scientific Research*, Universitas Airlangga Surabaya Februari:12651-12658.
- Sunjoyo, et.al. *Aplikasi SPSS*
- Santoso, W, 1996. The Determinants of Problem Banks in Indonesia: An Empirical Study, [http:// www.bi.go.id](http://www.bi.go.id). Diakses tanggal 10 Agustus 2019.
- Sudiyatno, Bambang, 2010. Peran Kinerja Perusahaan Dalam Menentukan Pengaruh Faktor Fundamental Makroekonomi, Risiko Sistematis, Dan Kebijakan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Study Empirik Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Disertasi*. Ilmu Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang
- Tandelilin, Eduardus, 2010. *Portofolio dan Investasi : Teori dan Aplikasi*. Edisi 1, Yogyakarta: Kanisius.
- Wahyudi, dan Pawestri. H.P. 2006. *Implikasi Struktur Kepemilikan Terhadap Nilai Perusahaan : Dengan Keputusan Keuangan sebagai Variabel Intervening*. *Simposium Nasional Akuntansi 9*. Padang
- Wongbangpo, Praphan dan Subhash C. Sharma, 2002. Stock Market and Macroeconomic Fundamental Dynamic Interaction : ASEAN-5 Countries. *Journal of Asian Economics* 13:27-51.
- Weston, J.F dan Copeland, T.E, 1991. *Managerial Finance*. Eight Edition, New York: The Dryden Press.